

## **GLOBALISASI EKONOMI DAN TANTANGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL**

**Pegi Syahri Rahmadhianas<sup>1\*</sup>**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

[pegisyahrirahmadhianas@gmail.com](mailto:pegisyahrirahmadhianas@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History:**

Received: 2025

Revised: 2025

Accepted: 2025

#### **Keyword:**

Globalisasi; Kedaulatan Nasional; Ekonomi Politik; Hukum Ekonomi Internasional.

### **ABSTRACT**

This article discusses the dynamics of economic globalization and its implications for Indonesia's national economic sovereignty. Globalization has opened broader access to international markets, stimulated the growth of the tourism sector, and accelerated the transformation toward a digital economy. These opportunities enable Indonesia to increase its competitiveness, expand global cooperation, and strengthen the contribution of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in international trade. However, behind these opportunities lie major challenges that threaten national independence. The dominance of multinational corporations in strategic sectors, dependency on foreign debt, and structural imbalances in international economic law place Indonesia in a vulnerable position against external pressures. This study employs a qualitative approach with a literature review method, integrating perspectives from political economy, international economic law, and globalization theory. A descriptive-analytical analysis is applied to identify both opportunities and threats to Indonesia's economic sovereignty. The results emphasize that strengthening domestic regulations based on Article 33 of the 1945 Constitution, promoting industrial downstreaming, empowering MSMEs, and actively participating in international forums are crucial strategies for protecting sovereignty in the era of globalization. With the right strategy, Indonesia can harness the benefits of globalization to drive sustainable economic growth without sacrificing its national economic sovereignty.

### **How to Cite:**

Syahri Rahmadhianas, Pegi. (2025). Globalisasi Ekonomi Dan Tantangan Kedaulatan Ekonomi Nasional. *Fluktuasi: Journal of Economy*, 1(1), 12-21.

## INTRODUCTION

Globalisasi merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, hukum, budaya, hingga ekonomi. Fenomena ini telah mempersempit batas-batas negara sehingga arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja semakin mudah bergerak melintasi wilayah. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang besar, tidak dapat melepaskan diri dari arus globalisasi tersebut.

Dalam ekonomi, globalisasi telah menciptakan peluang yang signifikan. Akses pasar yang lebih luas memungkinkan produk Indonesia, baik bahan mentah maupun barang olahan, masuk ke pangsa internasional. Selain itu, kemajuan teknologi digital mempercepat transaksi ekonomi lintas negara, sehingga membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen global.

Peluang globalisasi tersebut juga dibarengi dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah meningkatnya ketergantungan pada investasi asing dan utang luar negeri. Ketergantungan ini berpotensi membatasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam banyak kasus, syarat-syarat yang melekat pada pinjaman internasional tidak selalu sejalan dengan kepentingan rakyat.

Dominasi perusahaan multinasional (TNC) menjadi tantangan lain yang tidak kalah serius. Perusahaan global ini memiliki modal dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan domestik. Mereka kerap menguasai sektor-sektor vital, termasuk energi, pertambangan, dan industri strategis. Kondisi ini melemahkan kontrol pemerintah terhadap sumber daya nasional dan berpotensi menurunkan kemandirian ekonomi.

Ketidakseimbangan dalam hukum ekonomi internasional juga menjadi masalah besar. Aturan perdagangan global yang dibentuk melalui lembaga internasional cenderung lebih menguntungkan negara maju. Akibatnya, negara berkembang seperti Indonesia sering kali berada pada posisi tawar yang lemah dan kesulitan melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak adil.

Dari perspektif ekonomi politik, globalisasi juga memperburuk ketimpangan sosial di dalam negeri. Kelompok marjinal seperti petani kecil dan nelayan sering tidak mampu bersaing dengan produk impor murah. Hal ini memperbesar kerentanan mereka terhadap kemiskinan struktural dan menimbulkan disparitas sosial yang semakin lebar.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa globalisasi tidak jarang dipandang sebagai bentuk baru imperialisme. Ghazy (2009), misalnya, menyoroti bagaimana globalisasi menjadi sarana dominasi negara maju terhadap negara berkembang

melalui mekanisme ekonomi, politik, dan budaya. Dengan kata lain, globalisasi tidak selalu menghadirkan hubungan ekonomi yang adil.

Kajian kontemporer turut memperkuat pandangan tersebut. Putri dkk. (2023) menunjukkan bahwa hukum ekonomi internasional dan peran perusahaan multinasional semakin menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Purba dkk. (2023) menyoroti bagaimana globalisasi memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dan menekan kelompok rentan di masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan dilema besar bagi Indonesia. Di satu sisi, globalisasi memberikan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Namun, globalisasi juga mengancam kedaulatan ekonomi melalui dominasi asing, ketergantungan eksternal, dan ketidakadilan dalam tata kelola ekonomi global.

Dengan demikian, Indonesia dituntut untuk memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi globalisasi. Regulasi domestik harus diperkuat agar dapat melindungi kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat .

Selain regulasi, strategi hilirisasi industri juga perlu diperkuat. Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan harus mengembangkan industri pengolahan dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah dari sumber daya alam dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh pihak asing.

Pemberdayaan UMKM juga merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi domestik. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat perlu diberi dukungan melalui akses teknologi, pembiayaan, dan pelatihan. Dengan cara ini, UMKM dapat menjadi motor pertumbuhan sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan.

Di tingkat internasional, Indonesia harus berperan aktif dalam membentuk aturan perdagangan yang lebih adil. Partisipasi dalam forum global seperti WTO, ASEAN, dan G20 harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Hanya dengan strategi ganda penguatan domestik dan diplomasi internasional Indonesia dapat menghadapi globalisasi tanpa kehilangan kedaulatannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menelaah dinamika globalisasi secara komprehensif dengan menitikberatkan pada implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi nasional Indonesia. Lebih lanjut, tulisan ini juga berupaya menawarkan strategi agar Indonesia tidak hanya menjadi objek dalam arus globalisasi, tetapi juga subjek yang mampu menentukan arah

pembangunan ekonominya sendiri. Dengan pendekatan yang tepat, globalisasi dapat dijadikan peluang untuk memperkuat fondasi kedaulatan ekonomi nasional tanpa harus terjebak dalam dominasi asing.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena globalisasi ekonomi dan kaitannya dengan kedaulatan nasional melalui analisis literatur yang relevan. Dengan metode ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era globalisasi.

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup tesis Ghazy (2009) yang membahas pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara Indonesia sebagai dasar konseptual. Kedua, artikel Putri dkk. (2023) mengenai hukum ekonomi internasional yang menyoroti tantangan dan peluang Indonesia dalam sistem hukum global. Ketiga, jurnal Purba dkk. (2023) yang menguraikan dampak globalisasi melalui perspektif ekonomi politik.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan menelaah literatur yang relevan dengan tema globalisasi ekonomi dan kedaulatan nasional. Literatur yang dipilih mencakup sumber primer dan sekunder, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Fokus utama adalah literatur yang membahas integrasi ekonomi global, kedaulatan negara, hukum ekonomi internasional, serta dinamika peran perusahaan multinasional dalam konteks Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Analisis deskriptif bertujuan menyajikan fakta dan temuan dari berbagai literatur secara sistematis, sementara analisis analitis dilakukan dengan menghubungkan dan membandingkan temuan-temuan tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menyoroti hubungan sebab-akibat yang relevan dengan isu kedaulatan ekonomi.

Melalui pendekatan ini, penelitian mampu menyintesiskan berbagai konsep globalisasi, kedaulatan, dan kebijakan ekonomi ke dalam kerangka yang lebih utuh. Sintesis tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia serta ancaman yang harus diantisipasi dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan kata lain, metode ini membantu penelitian untuk tidak

sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga memberi kontribusi konseptual dalam merumuskan strategi menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

## RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini menemukan bahwa globalisasi menghadirkan peluang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Akses ke pasar internasional memungkinkan produk-produk lokal memiliki jangkauan yang lebih luas dan mampu bersaing secara global. Dengan keterhubungan yang semakin erat, Indonesia berpotensi mengekspor lebih banyak komoditas unggulan, baik dalam bentuk bahan mentah maupun barang olahan, sehingga mampu meningkatkan devisa negara dan memperkuat cadangan nasional.

Selain pasar internasional, perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu dampak positif dari globalisasi yang sangat terasa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan inovasi dalam sektor perdagangan, seperti e-commerce, fintech, serta sistem pembayaran digital. Transformasi ini membuka jalan bagi UMKM Indonesia untuk terhubung langsung dengan konsumen global tanpa harus bergantung pada rantai distribusi konvensional. Dampaknya, UMKM dapat menekan biaya distribusi sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Sektor pariwisata juga memperoleh manfaat besar dari globalisasi. Indonesia dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara. Arus wisatawan tidak hanya meningkatkan devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, termasuk transportasi, akomodasi, perhotelan, dan ekonomi kreatif. Dengan promosi berbasis teknologi digital dan kerja sama lintas negara, pariwisata berpotensi menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, di balik peluang tersebut, globalisasi juga membawa tantangan besar bagi kedaulatan ekonomi nasional. Salah satu tantangan serius adalah dominasi perusahaan multinasional (TNC) yang menguasai sektor-sektor vital seperti energi, pertambangan, dan industri manufaktur. Kehadiran TNC tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga memiliki kemampuan memengaruhi arah kebijakan nasional melalui lobi, investasi, dan perjanjian bisnis. Hal ini tentu dapat mengurangi kontrol Indonesia atas kekayaan alamnya sendiri.

Ketergantungan pada utang luar negeri menjadi tantangan berikutnya. Banyak proyek pembangunan infrastruktur maupun program ekonomi nasional masih bergantung pada pinjaman luar negeri atau bantuan lembaga keuangan internasional. Ketergantungan ini sering menimbulkan konsekuensi berupa terbatasnya ruang fiskal serta adanya kewajiban untuk mengikuti syarat-syarat yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan nasional. Pada akhirnya, hal ini

berimplikasi pada melemahnya otonomi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan.

Selain itu, terdapat ketidakseimbangan yang jelas dalam hukum ekonomi internasional. Aturan perdagangan global yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga internasional seperti WTO cenderung lebih menguntungkan negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia kerap berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan negosiasi perdagangan, sehingga kesulitan memperjuangkan perlindungan bagi industri domestiknya. Akibatnya, produk dalam negeri menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor.

Dari perspektif ekonomi politik, globalisasi juga memperparah ketimpangan sosial-ekonomi di dalam negeri. Kelompok marjinal seperti petani kecil dan nelayan tidak memiliki daya saing yang kuat ketika berhadapan dengan produk impor yang lebih murah. Kondisi ini menyebabkan mereka semakin terpinggirkan dari arus ekonomi modern, sekaligus memperbesar potensi terjadinya kemiskinan struktural. Dengan demikian, globalisasi sering kali menghasilkan distribusi manfaat yang timpang di antara kelompok masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat regulasi domestik yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini harus dijadikan dasar setiap kebijakan ekonomi sehingga globalisasi tidak membuat Indonesia menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Regulasi yang kuat akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya strategis dan sektor-sektor yang vital bagi rakyat.

Hilirisasi industri menjadi strategi penting dalam menghadapi tekanan globalisasi. Indonesia harus segera mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tambah dari sumber daya alam dapat dinikmati secara langsung oleh bangsa Indonesia, bukan hanya pihak asing. Selain itu, hilirisasi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat daya saing produk nasional di pasar global.

Pemberdayaan UMKM juga harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi globalisasi. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat perlu difasilitasi dengan akses teknologi, permodalan, dan pelatihan agar mampu meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya dukungan pemerintah, UMKM dapat bersaing di pasar global sekaligus menjadi alat pemerataan ekonomi di tingkat daerah. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi akibat globalisasi.

Selain memperkuat regulasi domestik dan sektor industri, Indonesia juga perlu aktif di tingkat internasional. Partisipasi dalam forum global seperti WTO, ASEAN, dan G20 harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dengan membangun koalisi bersama negara-negara yang memiliki posisi serupa, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi global. Diplomasi ekonomi yang kuat akan membantu mendorong lahirnya aturan perdagangan internasional yang lebih adil.

**Tabel 1. Ilustrasi Globalisasi Ekonomi dan Kedaulatan Ekonomi Nasional**

Aspek Globalisasi	Uraian
<b>Peluang Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pasar internasional lebih luas</li> <li>• Pertumbuhan sektor pariwisata</li> <li>• Transformasi ekonomi digital &amp; peluang UMKM</li> </ul>
<b>Tantangan Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi perusahaan multinasional (TNC)</li> <li>• Ketergantungan pada utang luar negeri</li> <li>• Ketidakadilan hukum ekonomi internasional</li> <li>• Ketimpangan sosial-ekonomi domestik</li> </ul>
<b>Strategi Nasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan regulasi domestik berbasis Pasal 33 UUD 1945</li> <li>• Hilirisasi industri</li> <li>• Pemberdayaan UMKM</li> <li>• Diplomasi ekonomi internasional (WTO, ASEAN, G20)</li> </ul>

Globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan strategi ganda yang mencakup penguatan domestik serta keterlibatan aktif dalam forum internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang globalisasi tanpa kehilangan kedaulatan ekonominya. Pendekatan ini akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, globalisasi bukan menjadi ancaman, melainkan sarana untuk memperkuat kemandirian bangsa.

## CONCLUSION

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan telah memengaruhi arah perkembangan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Arus perdagangan bebas, aliran investasi asing, serta perkembangan teknologi global telah membawa perubahan besar terhadap dinamika perekonomian nasional. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang pertumbuhan, memperluas akses ke pasar internasional, serta mempererat kerja sama antarnegara. Namun di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan berbagai risiko yang jika tidak diantisipasi dapat melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Salah satu tantangan utama globalisasi adalah meningkatnya ketergantungan Indonesia pada pihak asing. Baik dalam bentuk utang luar negeri maupun investasi

dari perusahaan multinasional, ketergantungan ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Ketika ketergantungan tersebut semakin besar, arah pembangunan bangsa berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan eksternal yang belum tentu selaras dengan kebutuhan rakyat. Situasi ini jelas menimbulkan kerentanan terhadap kedaulatan ekonomi.

Selain ketergantungan pada pihak asing, dominasi perusahaan multinasional (TNC) juga menjadi persoalan yang mendesak. Perusahaan-perusahaan global ini memiliki modal, teknologi, serta jaringan distribusi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan pelaku usaha lokal. Mereka kerap menguasai sektor vital seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur, sehingga peran negara dalam mengendalikan aset strategis berkurang. Apabila dominasi ini tidak diatur dengan regulasi yang tegas, kepentingan masyarakat luas dapat terabaikan dan kesenjangan ekonomi semakin melebar.

Dampak dari dominasi eksternal ini juga terlihat dalam melemahnya posisi pemerintah dalam mengendalikan harga, distribusi, maupun kebijakan strategis yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, globalisasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mengikis kemandirian bangsa. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang jelas dan terarah agar globalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia perlu mengadopsi strategi ganda. Di tingkat domestik, penguatan ketahanan ekonomi internal harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui hilirisasi industri, pengembangan UMKM, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Hilirisasi akan memastikan bahwa nilai tambah dari kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh pihak asing, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.

Pengembangan UMKM juga menjadi langkah krusial karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian rakyat. Dengan dukungan akses pembiayaan, pelatihan, dan teknologi, UMKM dapat ditingkatkan kapasitasnya untuk bersaing di pasar global. Pemberdayaan UMKM bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Selain strategi domestik, Indonesia harus berperan aktif dalam kancah internasional. Partisipasi dalam forum-forum global seperti WTO, ASEAN, dan G20 perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia dapat berkontribusi

dalam membentuk aturan perdagangan internasional yang lebih adil serta memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global.

Dengan kombinasi strategi internal dan eksternal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan globalisasi sebagai sarana pembangunan yang produktif. Globalisasi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai ancaman yang mengikis kedaulatan, melainkan sebagai peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan fondasi domestik melalui hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan akan menciptakan daya tahan ekonomi yang lebih kuat. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemandirian bangsa, tetapi juga memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peran aktif Indonesia di tingkat global menjadi kunci dalam memastikan bahwa aturan perdagangan internasional berjalan lebih adil dan berpihak pada negara berkembang. Melalui diplomasi ekonomi di forum-forum internasional seperti WTO, ASEAN, dan G20, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah arus persaingan global. Dengan sinergi antara strategi domestik dan diplomasi internasional, Indonesia mampu membangun perekonomian yang berdaulat, berkelanjutan, serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pendekatan ini akan menjadikan globalisasi sebagai instrumen yang memperkokoh kemandirian bangsa, bukan justru melemahkannya.

## REFERENCES

- Budiyanto. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Tatatanegara*. Jakarta: Erlangga.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Ghazy, N. (2009). *Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Negara Indonesia* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, D. S., Faizal, I. A., Estafania, S., Sapela, A., Arasyidi, U., & Siswajanty, F. (2023). Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2052>
- Purba, B., Sihombing, A. E., Nasution, N. F., & Siagian, A. P. (2023). Dampak Globalisasi dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional melalui Pandangan Ekonomi Politik. *Ekonomika*45, 10(2), 402–414.
- Rodiyah. (2022). *Hukum Ekonomi dan Regulasi Global*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wibowo, I., & Wahono, F. (2003). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. New York: W.W. Norton &

Company.

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction* (2nd ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W. W. Norton & Company.
- Chang, H. J. (2008). *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism*. New York: Bloomsbury Press.
- UNCTAD. (2021). *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery*. Geneva: United Nations.
- Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. (2014). *Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress*. New York: Columbia University Press.